

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Taliban merupakan kelompok ekstremis Islam yang dibentuk pada awal tahun 1990-an akibat konflik sipil di Afghanistan. Sebagian besar anggotanya berasal dari etnis Pashtun dan sebelumnya merupakan *mujahidin*¹ yang ikut berperang dalam melawan Uni Soviet. Kekuasaan Taliban di Afghanistan dimulai dengan pendudukan di Kandahar pada tahun 1994, hingga akhirnya Taliban berhasil menguasai Kabul pada tahun 1996.² Pada masa kekuasaan pertama rezim Taliban, mereka justru tidak mendapatkan respons positif dari lingkungan internasional dan domestik karena adanya penerapan hukum Islam yang terlalu ekstrem di wilayah yang dikuasai oleh Taliban. Kondisi tersebut diperburuk dengan keputusan Taliban untuk menjalin relasi yang erat dengan Al-Qaeda³, hingga melindungi pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden, dari tuntutan ekstradisi.

Isu penyerangan World Trade Center (WTC) pada 11 September 2001 oleh Al-Qaeda, ditambah dengan penolakan Taliban untuk menyerahkan bin Laden, mendorong Amerika Serikat (AS) dengan bantuan pasukan keamanan PBB untuk menerapkan kebijakan militer dengan tujuan menjatuhkan rezim Taliban di Afghanistan. Pada 7 Oktober 2001, AS memulai pelaksanaan *Operation Enduring Freedom* (OEF) yang bertujuan untuk membantu Northern Alliance⁴ dan gerakan anti-Taliban lainnya dalam mengusir Taliban dari Afghanistan. Operasi tersebut berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Taliban pada November 2001 dan rezim Taliban di

¹ *Mujahidin* merupakan penganut Islam yang terlibat dalam konflik dengan non-muslim untuk memperjuangkan nilai Islam.

² Thomas, "Taliban Government in Afghanistan: Background and Issues for Congress", 1. <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46955>.

³ Al-Qaeda merupakan gerakan ekstremis Islam yang dibentuk pada tahun 1986 oleh Osama bin Laden. Dalam praktiknya, Al-Qaeda menentang rezim yang tidak sesuai dengan hukum Islam serta kehadiran negara non-Islam di wilayah yang menganut hukum Islam. Sejak tahun 1990-an, Al-Qaeda membangun basis pertahanannya di Afghanistan di bawah perlindungan Taliban.

⁴ Northern Alliance merupakan aliansi multietnis yang berpegang pada nilai Islam moderat di Afghanistan dan menentang dominasi Taliban di negara tersebut.

Afghanistan secara resmi berakhir pada Desember 2001 ketika Taliban meninggalkan Kandahar.⁵

Pada tahun 2021, Taliban kembali menguasai sebagian besar wilayah Afghanistan. Hal itu diperkirakan terjadi karena adanya perjanjian damai antara AS dan Taliban pada Februari 2020, yang membuat Amerika Serikat dan aliansinya menarik mundur pasukan militernya dari Afghanistan serta melakukan gencatan senjata secara permanen. Sebagai gantinya, Taliban diharuskan untuk tidak menyerang AS dan aliansinya, serta mencegah tumbuhnya kelompok teroris di Afghanistan⁶. Kondisi tersebut membuat pasukan militer Taliban dapat melakukan ekspansi wilayah kekuasaan dengan signifikan dalam waktu singkat. Hingga 6 Agustus 2021, Taliban berhasil menguasai setidaknya 104 distrik di Afghanistan, yang kemudian meningkat menjadi 345 distrik atau sebanyak 87% wilayah Afghanistan hanya dalam kurun waktu sembilan hari. Bahkan, pada 15 Agustus, Taliban berhasil memasuki Kabul dan memaksa Presiden Ashraf Ghani untuk meninggalkan Afghanistan.⁷

Kembalinya Taliban sebagai rezim yang berkuasa di Afghanistan ini menunjukkan kegagalan Amerika Serikat dalam upayanya untuk membasmi Taliban. Akan tetapi, kembali berkuasanya Taliban tidak langsung menjadi ancaman dikarenakan Taliban sendiri memiliki banyak tantangan yang harus mereka hadapi dalam upaya mereka untuk menstabilisasi kepemimpinan kedua mereka ini. Permasalahan pertama yang dihadapi oleh Taliban adalah perbedaan pandangan dari dalam fraksinya, perbedaan pandangan di dalam fraksi ini terjadi di seluruh dimensi pemerintahan Taliban.⁸ Selain itu, Taliban juga harus memastikan pemimpin-pemimpin mereka untuk tidak berpaling ke kelompok lain seperti Islamic State-Khorasan Province (IS-KP) yang telah Taliban lawan selama bertahun-tahun. Perbedaan pandangan di dalam fraksinya ini pada akhirnya juga

⁵ Katzman & Thomas, "Afghanistan", 7.

⁶ "United States Signs Agreement with the Taliban, but Prospects for Its Full Implementation Remain Uncertain", *American Journal of International Law*, Vol. 114, No. 3 (2020), 529. <https://doi.org/10.1017/ajil.2020.45>.

⁷ BBC News, "How the Taliban stormed across Afghanistan in ten days", diakses pada 14 Juni 2022, <https://www.bbc.com/news/world-58232525>.

⁸ Brookings, "Will the Taliban regime Survive", diakses pada 6 September 2022, <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/08/31/will-the-taliban-regime-survive/>

merambah ke ranah keamanan, hal ini terbukti dengan terjadinya argumen antara Baradar sebagai Perdana Menteri dan Khalil Haqqani yang berperan sebagai Menteri Imigrasi di Kabul. Argumen tersebut terjadi karena keduanya merasa bahwa kemenangan Taliban terjadi dikarenakan mereka, Haqqani beranggapan bahwa pasukan militernya yang mengalahkan pasukan militer internasional adalah alasan terbesar kemenangan Taliban sedangkan Baradar beranggapan bahwa dengan apa yang telah mereka lakukan dalam menekankan kedamaian dan negosiasi adalah alasan terbesar kemenangan Taliban.

Di sisi lain, legitimasi juga menjadi permasalahan yang penting bagi Taliban. Taliban telah membentuk pemerintahan sementara yang terdiri dari 33 menteri dan beberapa deputi di dalamnya. Pemerintahan sementara ini tidak memiliki kejelasan mengenai bagaimana mereka akan memimpin Afghanistan, selain itu para menteri dan deputi di dalamnya juga akan mengalami banyak tantangan di dunia internasional dikarenakan kebanyakan dari mereka pernah masuk ke dalam penjara militer Amerika Serikat (AS) dan juga sedang berada di daftar buronan AS dan United Nations (UN). Permasalahan legitimasi selanjutnya ialah intervensi Pakistan yang sangat mendominasi di dalam pemerintahan baru ini. Intervensi tersebut pada akhirnya menurunkan legitimasi Taliban sebagai rezim yang berkuasa di mata para penduduk Afghanistan.⁹ Singkatnya, tidak adanya persatuan dan arah yang jelas akan pemerintahan sementara yang Taliban bentuk pada akhirnya menjadi tantangan tersendiri akan upaya mereka untuk mempertahankan kekuatan mereka di Afghanistan setelah kembali berkuasa.

Permasalahan Taliban tidak hanya muncul dari sisi internal saja, dari sisi eksternal sendiri perlawanan dari kelompok insurgensi lainnya menjadi permasalahan yang cukup berbahaya. Kelompok insurgensi yang dimaksud adalah IS-KP yang muncul di tahun 2015 dan akhir-akhir ini telah memperkuat upaya mereka untuk menantang Taliban sebagai rezim yang berkuasa di Afghanistan. Kelompok insurgensi selanjutnya berasal dari aktor yang dulunya terlibat dengan Afghanistan yaitu The National Resistance Front (NRF). Konflik di antara ketiga kubu ini memang telah terjadi semenjak tahun 1990-an

⁹ Miakhel, "For the Taliban, Governing Will Be the Hard Part", *Afghan Issues Paper* (United States Institute of Peace, 2021)

akan tetapi semenjak Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021, peran mereka pun berubah antara satu sama lain.¹⁰

Selain permasalahan di atas Taliban juga harus menghadapi ketertarikan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok untuk mengontrol kawasan Asia Tengah. Hal ini terjadi karena ketersediaan sumber daya yang melimpah di Asia Tengah dan lokasi strategis mereka yang menghubungkan Eropa dan Asia. Sumber daya yang melimpah di Afghanistan memiliki nilai yang diestimasikan menyentuh \$1 triliun, sumber daya yang dimaksud ini adalah sumber daya mineral seperti batu permata, batu rubi, zamrud, turmalin, dan lapis lazuli.¹¹ Selain berbagai macam batu permata tersebut Afghanistan juga memiliki sumber daya mentah yang sangat dibutuhkan untuk merawat dan menjalankan industri melalui berbagai macam tambangnya, tambang seperti besi, tembaga, litium, kobalt, bauksit, merkuri, uranium, dan kromium menjadi salah satu daya tarik terbesar akan mengapa negara-negara besar memperhatikan Afghanistan. Secara historis negara-negara di Asia Tengah lebih memilih untuk menyambut ketertarikan dari negara-negara besar dikarenakan potensi keuntungan yang dapat mereka raih dari ketertarikan tersebut. Hal ini pada akhirnya berujung kepada Asia Tengah yang menjadi wilayah geopolitik penting bagi negara-negara besar. Dalam menghadapi ketertarikan ini negara-negara di Kawasan Asia Tengah lebih memilih untuk bekerjasama dengan berpartisipasi ke dalam penentuan aturan dan juga berupaya untuk meraih keuntungan melalui hubungan mereka dengan Amerika Serikat, Russia, dan Tiongkok.¹² Di sisi lain, negara-negara besar tersebut juga memiliki kapabilitas untuk memengaruhi stabilitas politik dari aktor-aktor di wilayah Asia Tengah. Negara-negara besar dapat secara aktif mendukung dan melindungi kelompok politik yang akan mendukung kepentingan mereka.¹³

¹⁰ Crisis Group. “*Afghanistan’s Security Challenges under the Taliban*”, diakses pada 25 Oktober 2022, <https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/afghanistans-security-challenges-under-taliban>

¹¹ The Conversation. “*Afghanistan has vast mineral wealth but faces steep challenges to tap it*”, diakses pada 28 Oktober 2022, <https://theconversation.com/afghanistan-has-vast-mineral-wealth-but-faces-steep-challenges-to-tap-it-166484>

¹² Cooley, “*Great Games, Local Rules: The New Great Power Contest in Central Asia*” (Oxford Scholarship Online, 2012)

¹³ Umarov, “*How Rising Great Power Tensions Will Affect Central Asia*”, diakses pada 15 September 2022, <https://www.fpri.org/article/2021/04/how-rising-great-power-tensions-will-affect-central-asia/>

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana upaya Taliban dalam mempertahankan kekuatannya di tengah-tengah permasalahan dan juga ketertarikan dari negara besar terhadap Afghanistan?.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Taliban mempertahankan kekuatannya di Afghanistan dengan adanya berbagai macam permasalahan dan juga ketertarikan dari negara-negara besar.

1.4. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka memahami bagaimana pemberontak seperti Taliban dapat mempertahankan kekuatannya di Afghanistan, penulis akan mengelaborasi penelitian mengenai resiliensi Taliban sebagai sebuah organisasi. Resiliensi merupakan salah satu faktor penting dalam keberlangsungan suatu kelompok dalam mengumpulkan kekuatan dan kekuasaan untuk melakukan aktivitasnya. Weinstein menjelaskan bahwa resiliensi merupakan sebuah kondisi kelompok pemberontak yang merespons kekalahan dalam pertempuran, perubahan sumber daya, dan ancaman kontra-pemberontakan.¹⁴ Oleh karena itu, resiliensi merupakan fungsi dari ekonomi dan sosial pemberontakan yang membantu mental anggota kelompok pemberontak sekaligus membangun hubungan dengan masyarakat sipil. Resiliensi dalam suatu kelompok pemberontak juga dapat dilihat dari bagaimana dukungan masyarakat sipil yang menyebabkan kelompok tersebut dapat bertahan saat tertekan dalam pertempuran.¹⁵

Kelompok pemberontak selalu dikaitkan dengan pemimpin mereka yang karismatik sehingga berkontribusi besar dalam pergerakannya. Jordan menjelaskan bahwa seorang pemimpin pemberontakan yang karismatik dapat menanamkan nilai-nilai ideologinya kepada anggotanya, termasuk pemikiran bahwa ketua kelompok tersebut tidak

¹⁴ Weinstein, *Inside Rebellion: The Politics of Insurgent Violence* (New York: Cambridge University Press, 2007), 260-265

¹⁵ Jordan, "Attacking the leader: Why terrorist groups survive decapitation strikes", *International Security*, Vol. 38, No. 4 (2014),

tergantikan.¹⁶ Oleh karena itu, upaya kontra-pemberontakan juga berfokus terhadap penumpasan pemimpin kelompok pemberontak untuk melemahkan organisasi. Namun pada faktanya, stabilitas suatu kelompok pemberontak tidak hanya berasal dari bagaimana kondisi pemimpinnya, tetapi juga didorong oleh berbagai faktor lain seperti birokrasi dan struktur organisasi. Carley menganggap bahwa kelompok yang terdesentralisasi strukturnya cenderung memiliki resiliensi yang lebih kuat.¹⁷ Sementara itu, Sageman menyebutkan bahwa menjatuhkan pemimpin kelompok pemberontak bukan satu-satunya langkah yang tepat dengan melihat bagaimana struktur dalam organisasi tersebut.¹⁸

Resiliensi dari suatu kelompok juga dapat dilihat dari bagaimana ideologi dari kelompok tersebut mengakar ke anggota dan masyarakat. Jordan menyebutkan bahwa Ideologi menjadi cerminan orientasi dari sebuah kelompok, yang mana hal tersebut berasal dari keinginan suatu komunitas masyarakat yang memiliki tujuan untuk mencapai kebebasan atau otoritas di wilayah tertentu.¹⁹ Selain itu, Cronin menyebutkan bahwa ideologi juga dimanfaatkan untuk membedakan suatu kelompok pemberontak dengan aktor lainnya, diperkuat dengan penyebaran pemahaman sehingga dapat diturunkan kepada anggota lainnya sebagai bentuk regenerasi.²⁰ Hal ini membantu kelompok pemberontak untuk meluncurkan aksinya secara luas dan melanjutkan aktivitasnya walau mendapat tekanan dari pemerintah atau militer.

Berdasarkan pergerakan Taliban di Afghanistan, ada beberapa hal yang mendorong aktivitas kelompok tersebut. Khan et.al. menjelaskan bahwa Taliban dapat melakukan aktivitasnya di Afghanistan didorong oleh motif ideologi yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Pada awal pergerakannya, Taliban berfokus untuk meraih simpati masyarakat Afghanistan sehingga mereka dapat menerapkan hukum syariah di negara tersebut. Motif

¹⁶ Ibid, 9.

¹⁷ Ibid, 10.

¹⁸ Sageman, *Leaderless Jihad: Terror Networks in the Twenty-first Century* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2008), 130.

¹⁹ Jordan, "Attacking the leader: Why terrorist groups survive decapitation strikes", 20

²⁰ Cronin, *How Terrorism Ends* (New Jersey: Princeton University Press, 2009), 97. <https://doi.org/10.1515/9781400831142>.

ideologi ini menjadi salah satu pendorong penting dari pergerakan Taliban dengan dalih untuk mengembalikan hukum Islam sehingga mendapat dukungan dari masyarakat. Selain itu, ideologi yang dipegang oleh Taliban juga mendapat dukungan publik berkat demografi masyarakat Afghanistan yang mayoritas berada di wilayah pedalaman. Hal ini ditambah dengan propaganda ideologi dari Taliban yang menyasar pada kelompok etnis di berbagai wilayah pedalaman di Afghanistan untuk menggalang dukungan bagi kelompok tersebut dalam melawan Uni Soviet dan Amerika Serikat.²¹

Struktur organisasi dan birokrasi juga memiliki peran dalam aktivitas Taliban selama ini. Faruque menyebutkan bahwa struktur organisasi di dalam Taliban telah terdesentralisasi menjadi beberapa dewan kepemimpinan. Dewan tersebut, antara lain Quetta Shura yang membawahi Miran Shah Shura dan Peshwar Shura, Rasool Shura yang berada di wilayah Farah, Shura of the North yang berbasis di utara Afghanistan, serta Mashhad Shura yang beroperasi di Iran. Adanya beberapa dewan kepemimpinan di dalam Taliban menyimpulkan bahwa organisasi tersebut pada dasarnya adalah sebuah organisasi yang membawahi berbagai organisasi di bawahnya. Namun di sisi lain, desentralisasi yang terjadi di tubuh Taliban juga menyebabkan munculnya faksi-faksi yang mencoba merebut kekuasaan di dalam kelompok tersebut dan memicu terjadinya perpecahan internal.²²

Berdasarkan penjabaran literatur-literatur sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian sebelumnya dalam menganalisis bagaimana cara Taliban mempertahankan kekuatannya lebih berfokus kepada faktor internal. Pertama, aktor pemimpin dalam organisasi teroris menjadi aktor yang cukup penting dalam menanamkan ideologi serta membangun resiliensi organisasi. Kedua, ideologi menjadi penyokong kesuksesan sebuah organisasi dikarenakan ideologi membantu sebuah organisasi teroris dalam konteks ini Taliban mendapatkan simpati dari masyarakat setempat dan juga memberikan identitas kepada organisasinya. Ketiga, organisasi teroris seperti Taliban memiliki struktur organisasi yang kompleks dan terdesentralisasi. Namun, secara umum

²¹ Khan, et al., "The Afghan resilient insurgents: Understanding asymmetric insurgency in Afghanistan", *Multicultural Education*, Vol. 7, No. 10 (2021), 37-40.

²² Faruque, "The Taliban's survival: From post-2001 insurgency to 2020 peace deal with the United States", *Global-Local Interaction: Journal of International Relations*, Vol. 1, No. 2 (2020), 41.

literatur-literatur di atas hanyalah berfokus kepada Taliban di masa sebelum berhasil dipaksa mundur oleh Amerika Serikat pada tahun 2001, penelitian-penelitian sebelumnya juga kurang mengelaborasi peran dari faktor eksternal seperti negara-negara besar beserta ketertarikannya terhadap Afghanistan dalam upaya Taliban mempertahankan kekuatannya setelah mereka berhasil berkuasa kembali. Maka dari itu, penulis akan mencoba mengisi kekosongan dari penelitian sebelumnya mengenai bagaimana Taliban menghadapi ketertarikan dari negara-negara besar dalam upaya mereka mempertahankan kekuatannya setelah kembali berkuasa di Afghanistan pada tahun 2021.

1.5. Kerangka Teori

Dalam memahami upaya Taliban dalam mempertahankan kekuatan mereka setelah kembali berkuasa di Afghanistan maka diperlukan pemahaman akan mengapa negara diharuskan untuk membangun kekuatannya. Untuk memahami hal ini penulis melihat teori realisme struktural sebagai teori yang paling sesuai. Penjelasan realisme struktural akan mengapa sebuah negara harus membangun kekuatannya didasarkan atas lima asumsi dasar.²³

Asumsi pertama adalah *great power* merupakan aktor utama dalam politik internasional dan mereka beroperasi di dalam sistem yang bersifat anarkis. Hal ini bukan berarti bahwa sistem politik internasional merupakan sebuah sistem yang tidak terorganisir dan kacau melainkan berarti sistem yang bersifat anarkis ini memastikan tidak adanya aktor utama yang memiliki kedudukan di atas aktor lainnya. Asumsi kedua ialah setiap negara memiliki kekuatan berupa kapabilitas militer yang dapat digunakan untuk menyerang negara lain. Asumsi ketiga adalah sebuah negara tidak akan mampu menentukan intensi dari negara lain dalam menentukan kebijakannya, sebuah negara tidak akan pernah tau intensi dari negara lain apakah mereka tidak puas akan *balance of power* yang telah terbentuk dan akan menggunakan kekuatan militer mereka untuk merubahnya atau apakah mereka puas dengan hal tersebut sehingga mereka tidak harus menggunakan kekuatannya. Asumsi keempat adalah tujuan utama dari setiap negara adalah *survival*, setiap negara akan berupaya untuk memelihara integritas teritori dan juga otonomi dari politik domestik mereka. Asumsi terakhir adalah negara merupakan sebuah aktor yang

²³ Mearsheimer, “*Structural Realism*”, (2006)

rasional yang berarti negara merupakan aktor yang memiliki kapabilitas untuk menentukan strategi yang dapat memaksimalkan potensi mereka untuk tetap bertahan.²⁴

Realisme struktural juga menjelaskan bahwasannya di dalam politik internasional yang bersifat anarkis negara ketika mencoba untuk membangun dan mempertahankan kekuatan mereka akan mengalami sebuah tantangan yang disebabkan oleh sebuah *great power* seperti yang telah dijelaskan di atas. Dalam melawan tantangan tersebut biasanya sebuah negara dihadapkan kepada dua pilihan yaitu untuk memilih berpihak kepada *rising power* atau *established power*.²⁵ Sebuah negara dapat memilih untuk melakukan *balancing* melawan negara tersebut atau melakukan *bandwagoning* demi membangun aliansi. *Balancing* menjelaskan bahwa negara akan memfokuskan strategi mereka dengan tujuan menciptakan keseimbangan di ranah politik internasional.²⁶ Strategi tersebut dapat berupa penguatan faktor internal seperti meningkatkan kapabilitas ekonomi dan militer atau penguatan faktor eksternal seperti memperkuat dan memperbanyak aliansi atau melemahkan negara lain. Dalam ranah politik internasional yang bersifat anarkis penguatan faktor internal dipercaya lebih dapat diandalkan daripada penguatan faktor eksternal dikarenakan bagaimana penguatan faktor eksternal lebih bertumpu kepada strategi dan tindakan independen negara lain.²⁷ Di sisi lain, *bandwagoning* merupakan sebuah strategi dimana negara berupaya untuk menjaga keamanannya dengan mencari perlindungan dari kekuatan yang lebih kuat atau mungkin kekuatan yang mengancam mereka.²⁸ Secara singkat, *bandwagoning* merupakan sebuah praktik dimana sebuah negara akan mengorbankan sebagian besar otonomi mereka ke negara yang lebih kuat, sebagai gantinya negara yang lebih lemah tersebut akan mendapatkan perlindungan dari negara yang lebih kuat. Kedua strategi ini memiliki resikonya sendiri-sendiri.²⁹ *Balancing* sebagai sebuah strategi yang akan lebih efektif apabila terjadi penguatan internal sebuah negara akan beresiko menciptakan sebuah situasi kesalahan distribusi sumber daya yang

²⁴ Ibid.

²⁵ Yuzhu, "Hedging Strategy: Concept, Behavior, and Implications for China-ASEAN Relations*" (Chinese Academy of Social Sciences, 2022)

²⁶ Waltz, *Theory of International Politics* 1979. P. 125

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Koga, "The Concept of "Hedging" Revisited: The Case of Japan's Foreign Policy Strategy in East Asia Power Shift", *International Studies Review* (Nanyang Technological University, 2018)

pada akhirnya akan melemahkan infrastruktur sosial domestik. Selain itu *balancing* secara eksternal melibatkan resiko terjadinya “*entrapment*” dan “*abandonment*”. Sedangkan *bandwagoning* sendiri juga berpotensi menciptakan situasi hilangnya otonomi dikarenakan kuatnya dominasi politik dari aktor eksternal.

Pada lingkungan politik yang dinamis kedua strategi yang dijelaskan di atas seringkali gagal dalam menjelaskan perilaku sebuah negara dalam hubungannya dengan negara lain. Maka dari itu, banyak para ahli yang berargumen bahwa diperlukan sebuah konsep baru dan konsep tersebut adalah *hedging*.³⁰ *Hedging* secara luas merujuk kepada keamanan nasional atau *alignment strategy* yang diimplementasikan oleh sebuah negara terhadap negara lain yang terdiri dari gabungan elemen *balancing* dan *bandwagoning*.³¹ Secara lebih lanjut, Evelyn Goh menjelaskan bahwa *hedging* merupakan sebuah kumpulan strategi yang bertujuan untuk menghindari kondisi dimana sebuah aktor tidak dapat mengambil keputusan secara jelas seperti *balancing* atau *bandwagoning*.³² Cheng-Chwee Kuik menjelaskan bahwa *hedging* merupakan strategi yang digunakan oleh negara melalui implementasi kebijakan yang saling bertolak belakang dengan tujuan untuk menghindari risiko yang mungkin dihadapi oleh negara dan terjebaknya negara dalam satu kubu yang kaku. Di sisi lain, Björn Jerdén dan Linus Hagström mendefinisikan *hedging* sebagai suatu kondisi ketika negara tidak menggunakan satu strategi yang spesifik dan justru mengimplementasikan beberapa strategi yang berbeda karena munculnya dilema.³³ Berdasarkan definisi-definisi tersebut, *hedging* dapat dijelaskan sebagai suatu strategi yang dilakukan oleh sebuah negara untuk mempertahankan ambiguitas demi menghindari risiko yang mungkin terjadi ataupun konsekuensi negatif yang muncul akibat keputusan negara jika melakukan *balancing* atau *bandwagoning* dengan menggabungkan keduanya.

³⁰ Tran dan Sato, “*Vietnam’s Post-Cold War Hedging Strategy: A Changing Mix of Realist and Liberal Ingredients*”, *Asian Politics & Policy* Volume 10, Issue 1 p. 77, 2018.

³¹ Ciorciari & Haacke, “Hedging in international relations: an introduction”, *International Relations of the Asia-Pacific*, Volume 19, pp. 367, 2019.

³² Goh, “Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia: Analyzing Regional Security Strategies”, *International Security* vol. 32, no. 3 (MIT Press, 2007)

³³ Jerden dan Hagstrom, “Rethinking Japan’s China Policy: Japan as an Accomodator in the Rise of China, 1978-2011”, *Journal of East Asian Studies*, vol. 12 (2012), 241.

Taliban juga dihadapkan kepada tantangan dimana mereka harus memilih salah satu dari ketiga strategi di atas. Sebagai sebuah rezim yang berkuasa di negara yang berada dalam posisi strategis wilayah Asia Tengah, Taliban harus memilih untuk memihak kepada satu *established power* yaitu Amerika Serikat (AS), Rusia, atau Tiongkok apabila mereka ingin membangun dan mempertahankan kekuatannya.³⁴ Hal ini karena distribusi kekuatan di kawasan regional merupakan hal yang lebih penting bagi negara yang dikategorikan sebagai *small power* karena berdekatan secara geografis dengan *great power* adalah hal yang cukup mengkhawatirkan. Taliban harus memilih untuk memihak salah satu dari ketiga negara tersebut dikarenakan kecilnya kemungkinan mereka untuk melakukan *balancing* melawan ketiga negara itu melihat tantangan yang mereka hadapi ketika mereka baru saja kembali berkuasa. *Bandwagoning* menjadi strategi selanjutnya yang dapat dipilih oleh Taliban, akan tetapi strategi ini dianggap kurang cocok untuk digunakan karena hal ini berarti negara yang lebih kecil harus secara sukarela menerima kekuasaan negara yang lebih besar dan penerimaan kekuasaan tersebut biasanya berupa keselarasan tujuan politik dan juga kemudahan akses militer.³⁵ Namun, pada kenyataannya sejauh ini Taliban secara formal masih belum menjalin aliansi apapun dengan AS, Rusia ataupun Tiongkok yang berperan sebagai negara besar, hal ini menunjukkan bahwa *bandwagoning* masih belum menjadi strategi yang diimplementasikan oleh Taliban. Dalam kasus ini *hedging* menjadi satu-satunya strategi yang memiliki kemungkinan besar untuk digunakan Taliban. Strategi *hedging* yang pada dasarnya memberikan potensi baru bagi sebuah negara untuk mengurangi ancaman dari negara-negara besar dengan mengejar beberapa opsi kebijakan yang bertujuan untuk memberikan stabilitas di bawah situasi yang tidak pasti dan beresiko tinggi.³⁶

Ketiga negara besar yang dijelaskan di atas menjadi target utama dari strategi *hedging* yang akan digunakan oleh Taliban. AS tidak dapat menjadi target Taliban dikarenakan sejauh ini AS tidaklah mengakui legitimasi Taliban. Sedangkan Tiongkok dan Rusia walaupun belum secara formal belum mengakui legitimasi Taliban, kedua negara tersebut

³⁴ Shahi, "Rise of Taliban and Geopolitical Ambitions of China in Afghanistan, *International Journal of Social Science and Economic Research*, 2022.

³⁵ Kuik, "The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore's Response to a Rising China." *Contemporary Southeast Asia*, vol. 30, no. 2 (Ishak Institute, 2008)

³⁶ Ibid.

telah melakukan beberapa upaya untuk menjalin hubungan positif dengan Taliban. Wang Yi sebagai Menteri Luar Negeri Tiongkok menekankan bahwa Tiongkok akan “menghormati pilihan yang telah dibuat oleh masyarakat Afghanistan dan tidak akan mengintervensi permasalahan domestik Afghanistan”.³⁷ Wang Wenbin sebagai juru bicara Kementrian Luar Negeri Tiongkok pada konferensi pers yang diadakan tanggal 25 Maret 2022 secara jelas menyatakan “Tiongkok dan Afghanistan merupakan tetangga baik yang terhubung melalui pegunungan, Tiongkok menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah yang dimiliki oleh Afghanistan di bawah Taliban. Tiongkok tidak akan mengintervensi permasalahan domestik Afghanistan, mencari keuntungan, atau memperluas pengaruhnya di Afghanistan”.³⁸ Rusia sendiri juga telah memiliki intensi untuk menjalin hubungan positif dengan Taliban. Zamir Kabulov sebagai perwakilan yang ditunjuk Rusia untuk menangani Taliban menyatakan bahwa “Kami telah seringkali mengkonfirmasi kesiapan kami untuk menunjukkan keramahan jika perwakilan dari Taliban tertarik dengan hal itu”.³⁹

Melihat perkembangan politik internasional akhir-akhir ini Tiongkok dianggap sebagai aktor yang paling cocok sebagai target Taliban dalam membangun kembali kekuatannya. Hal ini dikarenakan sikap pragmatis yang diambil Tiongkok dalam kebijakan luar negerinya. Para pemimpin Tiongkok selalu bersedia untuk menjalin hubungan dengan negara yang bermasalah selama negara tersebut dapat membantu mereka untuk mencapai tujuannya.⁴⁰ Sedangkan Rusia sendiri sedang tidak berada dalam kondisi prima untuk membantu Taliban dikarenakan perang dengan Ukraina. Pada 6 April 2022 White House menjelaskan bahwa para ahli memprediksi GDP Rusia akan turun sebesar 15%

³⁷ Tiezzi, “China Signals It’s Back to Business as Usual With Taliban Government”, diakses pada 10 September 2022, <https://thediplomat.com/2022/03/china-signals-its-back-to-business-as-usual-with-taliban-government/>

³⁸ Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. “Foreign Ministry Spokesperson Wang Wenbin’s Regular Press Conference on March 25, 2022”, diakses pada 14 Oktober 2022, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/202203/t20220325_10655688.html

³⁹ REPUBLICWORLD. “Russia Officially Recognizes Diplomat Sent by Taliban As Charge D’affaires of Afghanistan”, diakses pada 10 September 2022, <https://www.republicworld.com/world-news/rest-of-the-world-news/russia-officially-recognizes-diplomat-sent-by-taliban-as-charge-daffaires-of-afghanistan-articleshow.html>

⁴⁰ Kretzschmar et al, “Between Pragmatism and Uncertainty: The Taliban as Beijing’s Lesser Evil”, diakses pada 15 September 2022, <https://polis180.org/polisblog/2021/08/31/between-pragmatism-and-uncertainty-the-taliban-as-beijings-lesser-evil/>

dikarenakan perang yang mereka lancarkan, penurunan ini pada akhirnya akan menghapuskan pembangunan ekonomi yang Rusia upayakan selama 15 tahun terakhir.⁴¹ Terdapat potensi besar bahwasannya penurunan ini pada akhirnya menghapuskan status Rusia sebagai *major economy* yang akan berujung kepada isolasi.⁴² Maka dari itu, Tiongkok menjadi satu-satunya negara yang sangat memungkinkan untuk menjadi pembantu Afghanistan di bawah Taliban.

Dalam konteks penelitian ini, Taliban dipahami akan mengimplementasikan strategi *hedging* dalam menghadapi ketertarikan negara-negara besar di kawasannya dan target utamanya adalah Tiongkok. Dalam memahami strategi *hedging* yang digunakan oleh Taliban penulis akan menggunakan konsep *hedging* yang dikembangkan oleh Kei Koga. Koga menjelaskan bahwa *hedging* harusnya bukan dipahami sebagai sebuah strategi yang berada di tengah-tengah *balancing* atau *bandwagoning* melainkan sebuah strategi yang menggabungkan keduanya. *Hedging* juga dapat dipahami sebagai perilaku sebuah negara dalam upayanya untuk mempertahankan ambiguitas strategi demi meminimalisir atau menghindari resiko dan ketidakpastian dari konsekuensi yang dihasilkan oleh strategi *balancing* atau *bandwagoning*. Selanjutnya, Koga membagi *hedging* ke dalam enam strategi yaitu; (1) *strategic hedging* yang terdiri dari *military balancing* dan *economic bandwagoning*; (2) *soft hedging* yang terdiri dari *diplomatic balancing* dan *economic bandwagoning*; (3) *economic hedging* yang terdiri dari *military bandwagoning* dan *economic balancing*; (4) *security hedging* yang terdiri dari *military bandwagoning* dan *diplomatic balancing*; (5) *diplomatic hedging* yang terdiri dari *economic balancing* dan *diplomatic bandwagoning*; dan yang terakhir (6) *politic-military hedging* yang terdiri dari *economic bandwagoning* dan *diplomatic balancing*.⁴³ Perilaku sebuah negara dapat dikategorikan sebagai *hedging* apabila terdapat salah satu dari enam strategi tersebut.

Koga memperjelas apa yang dimaksud oleh enam strategi tersebut. Enam strategi tersebut harus dipahami sebagai “two plus four” daripada “two plus six” dikarenakan indikator

⁴¹ Orenstein, “*The War’s Impact on Russia’s Economy and Ukrainian Politics*”, diakses pada 15 September 2022, <https://www.fpri.org/article/2022/06/the-wars-impact-on-russias-economy-and-ukrainian-politics/>

⁴² Ibid.

⁴³ Koga, “The Concept of “Hedging” Revisited: The Case of Japan’s Foreign Policy Strategy in East Asia’s Power Shift”, *International Studies Review*, pp: 642 Volume 20, Issue 4. (2018)

utama yang digunakan adalah kapabilitas militer dan ekonomi sebagai data utama sedangkan faktor diplomatik digunakan sebagai data sekunder dalam menentukan apakah sebuah negara melakukan *hedging*.⁴⁴ *Conventional hedging* dan *economic hedging* adalah sebuah strategi yang dapat secara jelas didefinisikan berdasarkan aksi ekonomi dan militer. Sedangkan *soft hedging*, *security hedging*, *diplomatic hedging*, dan *politico-military hedging* adalah berdasarkan ekspektasi dari perilaku sebuah negara di masa depan daripada perilakunya saat ini, maka dari itu kategori ini tidaklah memberikan sinyal yang jelas bagi para peneliti dan akhirnya faktor diplomasi pun harus diinterpretasikan ke dalam praktik kebijakan nyata untuk memahami ke-empat kategori tersebut.

Secara lebih lanjut, sebuah negara dapat melakukan *economic balancing* dan *bandwagoning*. *Economic balancing* diartikan sebagai pengaplikasian alat yang ada seperti sanksi ekonomi sedangkan *economic bandwagoning* memiliki tujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi tanpa memperdulikan terjadinya sebuah ketergantungan. Di sektor militer sendiri, aliansi militer dengan negara lain yang menjadi ancaman besar diartikan sebagai *military balancing* sedangkan untuk bergabung dengan negara lain secara militer dalam melawan sebuah ancaman yang sama dikategorikan sebagai *military bandwagoning*. Sedangkan di dalam diplomasi sendiri praktik memaksakan norma-norma tertentu ke negara target melalui institusi yang menjadi eksklusif dan membentuk keselarasan politik dapat dikategorikan sebagai *diplomatic balancing*. Sedangkan *diplomatic bandwagoning* sendiri merupakan sebuah praktik meningkatkan kepercayaan sebuah negara dengan komunikasi dan pertukaran informasi melalui institusi internasional yang inklusif.⁴⁵

Dalam mengoperasionalkan konsep *hedging* ini Koga beranggapan bahwa kapabilitas militer dan ekonomi harus dianalisis terlebih dahulu.⁴⁶ Faktor ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan karena semakin besar tingkat ekonomi negara, semakin besar kekuasaan yang dimiliki sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. Hal itu karena kapabilitas ekonomi yang besar memunculkan dependensi dari negara lain

⁴⁴ Ibid. 642

⁴⁵ Ibid. 642

⁴⁶ Ibid. 643

sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya *balancing* terhadap negara.⁴⁷ Di samping itu, kapabilitas ekonomi juga menunjukkan kapabilitas militer suatu negara. Potensi kapabilitas ekonomi dan militer negara kemudian dapat diterjemahkan sebagai salah satu indikator yang menentukan apakah negara akan terlibat dalam *balancing*, *bandwagoning*, atau *hedging*.⁴⁸

Kapabilitas ekonomi sebuah negara akan diukur melalui GDP negara dan juga perkembangannya. Walaupun ukuran GDP dan juga perkembangannya tidak mampu secara jelas mendefinisikan perilaku sebuah negara, mereka memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi potensi sumber daya ekonomi yang dapat dikonversikan ke kapabilitas militer. Selain itu, interaksi ekonomi antar negara juga berpengaruh dalam menentukan apakah negara tersebut secara ekonomi melakukan *balancing* atau *bandwagoning*. Interaksi ekonomi ini tidak dikategorikan sebagai *bandwagoning* apabila tidak ada ketergantungan ekonomi atau resiko yang datang dari interaksi ini, hal ini diukur melalui jumlah Foreign Direct Investment (FDI) dan juga ekspor dan impor sebuah negara dalam pertimbangan mengukur ketergantungannya. Sedangkan apabila sebuah negara menerima resiko yang datang dari interaksi ekonomi ini maka hal ini dikategorikan sebagai *bandwagoning*.

Dokumen-dokumen penting dalam sektor keamanan seperti white papers atau pernyataan pemimpin dapat digunakan dalam melacak evolusi kebijakan pertahanan sebuah negara terhadap negara yang menjadi target. Kebijakan pertahanan sebuah negara dapat digunakan untuk mengidentifikasi external *balancing*. Secara lebih lanjut, kapabilitas militer akan diukur melalui pengeluaran tahunan dalam sektor keamanan dan dampaknya terhadap Gross Domestic Product (GDP) negara tersebut, pengukuran ini dikategorikan sebagai internal *balancing*.

Ketika kedua sektor di atas tidak mampu secara jelas menjelaskan apakah sebuah negara melakukan *hedging* atau tidak maka faktor diplomatik akan diteliti lebih lanjut.

⁴⁷ Papayouanou, "Interdependence, Institutions, and the Balance of Power: Britain, Germany, and World War I", *International Security*, vol. 20, no. 4 (1996), 53.

⁴⁸ Koga, "The Concept of "Hedging" Revisited", 642.

Perkembangan diplomatik kedua negara akan diteliti melalui interaksi yang dilakukan antara negara dengan targetnya menggunakan catatan historis formal ataupun informal seperti pernyataan atau berita yang berasal dari media di antara keduanya.⁴⁹

1.6. Hipotesis

Hipotesis penelitian ini bahwa upaya Taliban dalam mempertahankan kekuatannya di tengah-tengah permasalahan dan juga ketertarikan dari negara besar terhadap Afghanistan adalah melalui strategi *hedging* ke Tiongkok.

1.7. Metodologi dan Metode Penelitian

1.7.1. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Konsep

1.7.1.1. Strategi *Hedging*

Strategi *hedging* penelitian ini merupakan turunan dari konsep Koga yang memahami *hedging* melalui enam pola strategi *hedging*. Penelitian ini akan mengoperasionalkan sejumlah kemungkinan-kemungkinan strategi *hedging* tersebut berdasarkan data-data yang diperoleh dari sektor militer, ekonomi, dan diplomasi. Di dalam sektor militer penulis mengoperasionalkan *hedging* melalui analisis terhadap beberapa variabel seperti dampak anggaran pertahanan terhadap GDP sebuah negara, dokumen-dokumen penting seperti *white papers*, dan juga pernyataan-pernyataan dari para pemimpin kedua negara. Selain itu, GDP beserta perkembangannya dan juga interaksi ekonomi antara kedua negara akan digunakan sebagai pengukur kapabilitas ekonomi sebuah negara. Sedangkan dalam sektor diplomasi sendiri interaksi formal dan informal kedua negara akan digunakan sebagai variabel penelitian.

1.7.2. Tipe Penelitian Eksplanatif

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian eksplanatif karena Penulis mencari bagaimana Taliban mengimplementasikan strategi *hedging* terhadap Tiongkok. Selain itu, sifat eksplanatif yang Penulis ambil juga berdasarkan rumusan masalah yang ingin dijawab oleh penelitian ini, yakni menjelaskan cara sebuah aktor mengimplementasikan suatu hal dengan mengidentifikasi cara yang mereka lakukan.

1.7.1.2. Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian

⁴⁹ Ibid. 643

Penelitian dibatasi pada analisis terkait bidang militer, ekonomi, diplomasi dan strategi Taliban dalam upaya pembangunan kekuatannya setelah kembali berkuasa di Afghanistan. Untuk itu, jangkauan waktu yang digunakan pada penelitian ini adalah 15 tahun terakhir (2007-2022). Pembatasan ruang lingkup penelitian ini dilakukan demi memfokuskan pembahasan yang dilakukan tanpa melibatkan aspek yang dianggap kurang relevan seperti negara besar lain yang tidak memungkinkan untuk membantu Taliban dalam membangun kekuatannya. Namun, penelitian dapat pula melibatkan data-data yang berada di luar batasan-batasan tersebut jika dinilai relevan dan dapat membantu untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data-data yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, maupun sumber-sumber lain yang telah dipublikasikan sebelumnya. Di samping itu, penelitian juga memanfaatkan artikel daring yang relevan dan kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Tidak menutup kemungkinan penelitian juga akan melibatkan data primer melalui dokumen resmi pemerintah ataupun organisasi terkait, jika ditemukan. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis berdasarkan konteks permasalahan yang diambil oleh penulis.

1.7.4. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi, memahami, dan menginterpretasi fenomena sosial dalam lingkup kejadian yang sebenar-benarnya⁵⁰. Melalui metode kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi fenomena dalam konteks tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data dan sudut pandang untuk memunculkan berbagai perspektif terkait fenomena tersebut. Dalam penelitian kualitatif, data ataupun hasil penelitian dijabarkan dalam bentuk kata ataupun kalimat sehingga lebih menyeluruh dan lebih mudah dipahami.

⁵⁰ Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks: SAGE, 2014)

1.7.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi ke dalam lima bab. **Bab I** meliputi pendahuluan terkait penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, hipotesis, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam **Bab II**, berisi pembahasan mengenai kapabilitas militer Taliban dan Tiongkok. **Bab III** berisi pembahasan mengenai kapabilitas ekonomi Taliban dan Tiongkok. **Bab IV** berisi mengenai pembahasan interaksi diplomasi antara Taliban dan Tiongkok. **Bab V** berisi analisis strategi *hedging* yang diimplementasikan oleh Taliban terhadap Tiongkok. **Bab VI** berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan.